

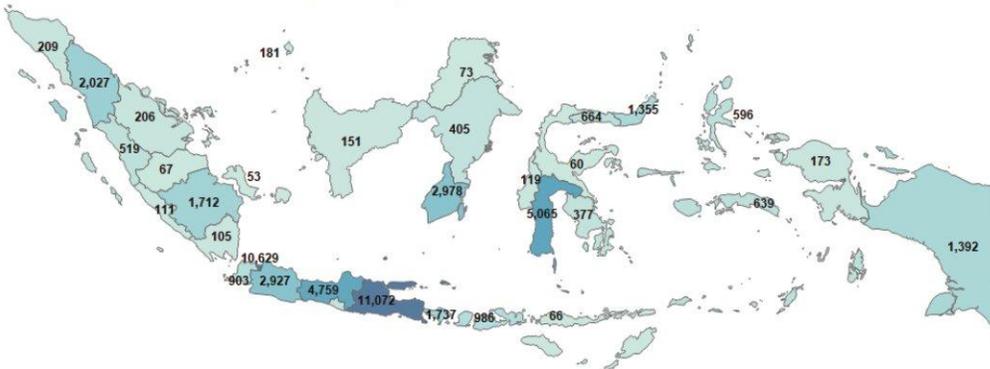


UPDATE
PUBLIK
PEMANTAUAN
INFORMASI

JULI 2020

GENDER OBSERVATORY: KRISIS COVID-19

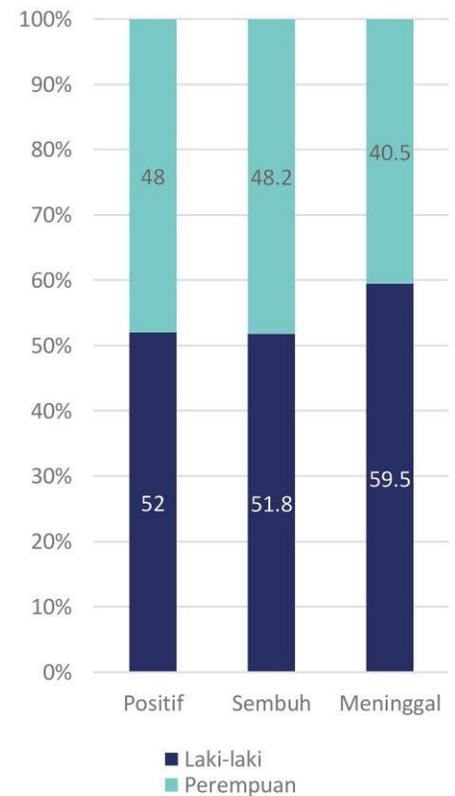
Jumlah Perempuan dan Anak Perempuan yang Terkonfirmasi Positif COVID-19 di Indonesia per 4 Agustus 2020



Peta kasus terkonfirmasi per provinsi: Warna gelap menunjukkan kasus terkonfirmasi lebih banyak
Data: <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

Jumlah total kasus terkonfirmasi di Indonesia telah melampaui 100.000 orang pada 27 Juli, sementara pada 30 Juli, angka korban meninggal nasional melampaui 5.000 jiwa.

Hingga 5 Agustus, sebanyak 116.871 orang (48% di antaranya perempuan) telah terinfeksi COVID-19 di Indonesia. Perempuan dan anak perempuan mencakup 48,2% dari total 73.889 pasien sembuh dan 40,5% dari total 5.452 pasien meninggal dunia.



Editorial

Edisi nawala Gender Observatory bulan Juli ini berfokus pada pekerja migran perempuan dan perempuan kepala keluarga, yang merupakan dua kelompok yang menghadapi kerentanan lebih tinggi pada masa krisis COVID-19 ini. Pada edisi ini:

- Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) berbagi hasil survei yang mereka lakukan terhadap 6.324 rumah tangga di 17 provinsi. Temuan survei tersebut menunjukkan bagaimana kesalahan (error) inklusi dan eksklusi basis data mengakibatkan banyak perempuan kepala keluarga tidak mendapatkan perlindungan sosial yang krusial. PEKKA menawarkan rekomendasi yang efektif untuk memastikan agar berbagai kelompok marjinal mendapatkan bantuan.
- Migrant CARE menganalisis risiko yang dihadapi para perempuan pekerja migran Indonesia, termasuk hilangnya lapangan kerja, stigmatisasi, keterpaparan terhadap virus, serta tidak mendapatkan program perlindungan sosial.
- Desa Rogojati disebutkan sebagai desa yang menerapkan kebijakan responsif-gender untuk mendukung komunitas pekerja migran.

The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) berusaha mengembangkan cara-cara untuk meningkatkan hasil bagi para perempuan pekerja migran. Penelitian J-PAL menyoroti pentingnya informasi dan pilihan bagi para calon pekerja migran perempuan, serta bagaimana pandemi saat ini dapat membuat tantangan mereka semakin sulit.

PEKKA memonitor program-program bantuan sosial COVID-19 di 17 provinsi

Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) berfokus pada pengentasan kemiskinan dan keadilan bagi para perempuan kepala keluarga (PKK) yang merupakan salah satu kelompok termiskin dan paling marjinal di masyarakat. Sejak awal terjadinya krisis COVID-19, PEKKA telah memonitor PKK demi memastikan agar mereka dapat mengakses dukungan yang tersedia untuk membantu mengatasi kesulitan ekonomi pada masa pandemi.

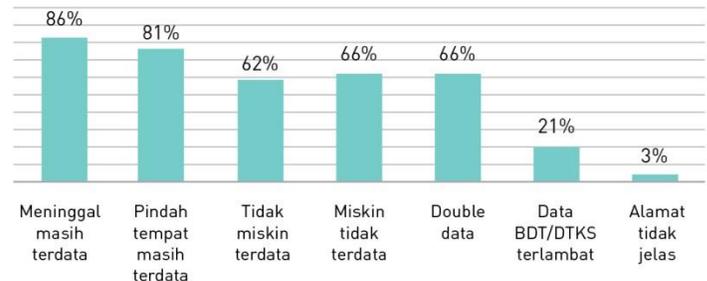
Dalam sebuah survei besar yang dilaksanakan sejak 21 Mei hingga 3 Juni 2020, 119 kader PEKKA yang telah dilatih memonitor distribusi bantuan sosial di 90 desa dan 90 dusun/RT yang meliputi 6.324 rumah tangga di 42 kabupaten dan 17 provinsi. PEKKA juga mewawancarai 87 pejabat pemerintah desa.

Survei tersebut mengungkap adanya sejumlah masalah spesifik dalam distribusi bantuan, termasuk *error* inklusi dan eksklusi basis data yang diakibatkan sistem data yang kadaluarsa dan kesalahan prosedural.

Profil Responden:

- Sebanyak 19% responden adalah perempuan kepala keluarga (PKK), sementara 81% adalah laki-laki kepala keluarga (LKK).
- Tingkat pendidikan seluruh kepala keluarga tersebut relatif rendah, meskipun jumlah PKK yang tidak pernah bersekolah lebih besar (38%) dibandingkan LKK (15%).
- Sebanyak 75% PKK dan LKK mengatakan bahwa pendapatan mereka telah berkurang selama masa pandemi.
- PKK memperoleh penghasilan kurang dari LKK: Sebanyak 82,1% PKK dan 59,5% LKK melaporkan bahwa pendapatan mereka menjadi kurang dari Rp 1 juta (sekitar AU\$ 95) per bulan pada masa pandemi ini. Sebanyak 56,1% PKK dan 29,9% LKK melaporkan bahwa pendapatan mereka kurang dari Rp 500.000.

MASALAH DALAM DATA DTKS



Distribusi Bantuan Sosial:

- Sebanyak 23% PKK dan 29% LKK tidak pernah menerima bantuan sosial apa pun dari pemerintah. Dari PKK yang menerima bantuan, 72% menerima satu jenis bantuan, 22% menerima dua jenis bantuan, dan 6% menerima tiga jenis bantuan.
- Salah satu *error* eksklusi telah menyebabkan kerugian bagi para warga lanjut usia miskin. Sebanyak 18% PKK lansia dan 20% LKK lansia tidak pernah menerima bantuan sosial apa pun dari pemerintah.
- Sebanyak 9% PKK dan 19% LKK disabilitas tidak pernah menerima bantuan sosial apa pun.
- Sebanyak 71% pejabat pemerintah desa yang diwawancarai melaporkan adanya masalah inklusi dan eksklusi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Isu yang paling sering diangkat meliputi tetap terdaftarnya nama warga yang sudah wafat di basis data, eksklusi warga miskin, dan inklusi warga non-miskin.

- Sebanyak 67% pejabat pemerintah desa menyatakan bahwa *error* eksklusi terjadi karena keluarga miskin tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang dibutuhkan untuk mengakses program-program pemerintah.
- Sebanyak 22% desa telah membuat kebijakan khusus bagi PKK miskin pada masa pandemi ini. Desa-desa ini menerapkan berbagai metode untuk memastikan agar para PKK miskin dan kelompok marjinal tidak dilewatkan dalam bantuan sosial.
 - Sebanyak 94% desa secara terbuka memverifikasi data di Musyawarah Desa (MusDes).
 - Sebanyak 32% desa langsung melibatkan perempuan miskin dalam musyawarah-musyawarah tersebut.
 - Salah satu metode lain untuk menghindari eksklusi kelompok yang berhak adalah dengan menampilkan nama para penerima manfaat di papan pengumuman desa dan media sosial.

Rekomendasi:

1. Berbagai program bantuan sosial bagi warga miskin harus diperluas, dan bantuan strategis harus diberikan untuk mencapai pemulihan ekonomi.
2. Untuk mengurangi *error* eksklusi dan inklusi, perbaikan sistem pengumpulan data perlindungan sosial harus dilaksanakan dengan:
 - berbasis komunitas dan melibatkan seluruh elemen masyarakat;
 - menggunakan pendekatan bawah ke atas (*bottom-up*) - data harus dikumpulkan dari unit terkecil di masyarakat, yaitu RT, hingga ke tingkat nasional; dan
 - daftar penerima manfaat harus dapat diakses secara terbuka bagi seluruh anggota masyarakat.
3. Desa-desa harus memiliki sistem data terpilah yang mencakup gender, disabilitas, lansia, dan kondisi khusus lainnya.
4. Seluruh tingkatan pemerintahan harus mengembangkan kebijakan-kebijakan aksi afirmatif untuk menjangkau kelompok miskin yang rentan, termasuk PKK, warga lansia, dan penyandang disabilitas.

Oleh: Direktur PEKKA, Nani Zulminarni

Pekerja migran perempuan menghadapi 'krisis di dalam krisis'

Para pekerja migran Indonesia yang mayoritasnya adalah perempuan, menghadapi tantangan unik dan kerentanan berlapis dalam menghadapi krisis COVID-19. Penurunan ekonomi global menyebabkan para perempuan pekerja migran Indonesia menjadi rentan kehilangan pekerjaan dan dipulangkan paksa akibat diakhirinya kontrak dan berkurangnya pasar tenaga kerja.

[Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengumumkan](#) bahwa per 29 Juni, 162.000 pekerja migran telah kembali ke Indonesia sejak dimulainya pandemi, sementara [50.000 lainnya diprediksi akan menyusul](#) pada bulan Juli dan Agustus. Para pekerja ini menghadapi peningkatan risiko terkena virus pada saat dalam perjalanan internasional dan transit.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) telah memperingatkan bahwa terdapat kemungkinan sekitar sepuluh juta pekerja migran Indonesia (PMI) kembali ke Indonesia dan menjadi pengangguran dan jatuh miskin, sehingga mengalami '[krisis di dalam krisis](#)'. Kembalinya para PMI dalam jumlah besar ini telah berdampak pada perekonomian di desa-desa di seluruh Indonesia yang umumnya terbantu oleh remitansi yang dikirimkan oleh anggota keluarga mereka yang bekerja di luar negeri. [Remitansi global diprediksi akan menurun drastis](#) sebesar sekitar 20% pada tahun 2020 - hal ini merupakan kerugian ekonomi yang sangat signifikan bagi banyak sekali rumah tangga rentan.

[Migrant CARE](#) telah mengkompilasi laporan dari berbagai organisasi dan serikat pekerja migran di Hong Kong dan Singapura, yang mengungkapkan bahwa banyak pekerja

domestik migran perempuan yang tetap bekerja namun menghadapi peningkatan beban kerja. Hal ini disebabkan kebijakan karantina yang membuat mereka tidak bisa meninggalkan rumah majikan mereka. Para pekerja juga melaporkan bahwa mereka tidak menerima bayaran yang layak atas penambahan kerja tersebut. Kondisi ini dapat memicu konflik antara pekerja dan para majikannya, dan membuat para PMI rentan mengalami kekerasan.

Di Malaysia, para PMI yang dipekerjakan dengan sistem upah harian atau mingguan menghadapi tantangan yang unik. Perintah Pembatasan Pergerakan (*Movement Control Order/MCO*) telah menghambat mobilitas mereka serta membatasi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sentimen anti-migran dan stigmatisasi terhadap migran telah mendorong para [ahli HAM PBB untuk menyuarakan](#) adanya peningkatan xenofobia dan penggerebekan terhadap komunitas pekerja migran, yang menyebabkan ketakutan dan menghalangi akses pekerja migran terhadap layanan kesehatan.

Migrant CARE dan para mitranya memonitor data dari delapan kabupaten di lima provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 68% PMI yang kembali ke daerah-daerah tersebut adalah perempuan.

[ILO mencatat](#) bahwa para PMI seringkali harus berjuang untuk mengakses perlindungan sosial, sehingga mereka semakin rentan terhadap dampak sosial-ekonomi COVID-19. Isu-isu terkait akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) membuat komunitas para pekerja migran di Indonesia menjadi rentan dieksklusi dari berbagai program perlindungan sosial.

Tanggapan

Pada 31 Maret, Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet untuk mempersiapkan pemulangan PMI berskala besar. Tindak lanjut dari rapat kabinet ini adalah penyiapan berbagai fasilitas kesehatan dan pengembangan sejumlah protokol khusus untuk melindungi para PMI yang pulang tersebut. Namun, hasil pemantauan Migrant CARE menunjukkan bahwa sebenarnya ada lebih banyak hal yang dapat dilakukan untuk memastikan agar informasi yang memadai tentang ketentuan pembatasan sosial dan opsi perjalanan dapat diperoleh oleh para perempuan PMI.



Tren mengkhawatirkan koperasi DESBUMI di era COVID-19

Koperasi dapat memainkan peran penting dalam upaya reintegrasi sosial dan ekonomi para PMI yang kembali ke masyarakat asal mereka. Namun, banyak kelompok dari para PMI yang pulang ke desa-desa DESBUMI (Desa Peduli Buruh Migran) tersebut terpaksa mengurangi atau menghentikan kegiatan usaha mereka akibat pandemi ini.

Migrant CARE melakukan pemantauan sejak bulan April hingga Mei 2020, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh UMKM yang dijalankan oleh perempuan PMI yang pulang dan menjadi bagian program DESBUMI telah terdampak oleh COVID-19. Terdapat 239 usaha di delapan kabupaten - Indramayu, Kebumen, Wonosobo, Banyuwangi, Jember, Lombok Tengah dan Lembata - yang terdaftar di Program DESBUMI. Migrant CARE telah memetakan 185 dari UMKM tersebut, yang mayoritasnya memproduksi makanan dan kerajinan.

Pemetaan ini mengungkapkan adanya tren yang mengkhawatirkan:

5. 36% usaha melaporkan menghadapi masalah terkait akses pasar;
6. 22% melaporkan mengurangi produksi;
7. 18% melaporkan mengalami kesulitan mendapatkan stok; dan
8. sebanyak 6% melaporkan bahwa usaha mereka terpaksa ditutup karena pandemi ini.

Di sisi lain, pemantauan ini juga menunjukkan bahwa terdapat sekumpulan usaha perempuan akar rumput yang menjalankan praktik baik dan respons yang inovatif untuk membangun ketahanan komunitas dan memperkuat perekonomian desa selama pandemi. Beberapa kelompok perempuan PMI yang pulang telah mengubah lini usaha mereka menjadi produksi dan pemasaran masker dan jamu.

Penting sekali memastikan agar seluruh kerangka kebijakan dan tata kelola yang ditujukan untuk melindungi para perempuan PMI ini mencakup seluruh

tahap migrasi, serta mencakup perlindungan sosial dan stimulus ekonomi bagi kelompok-kelompok perempuan PMI yang pulang tersebut. Koordinasi yang baik khususnya antara pemerintah pusat, daerah dan desa akan membantu menjamin pelaksanaan perlindungan yang komprehensif bagi komunitas PMI.

Untuk pertanyaan lebih lanjut tentang pemantauan dan kerja Migrant CARE lainnya, hubungi:

evi@migrantcare.net atau yovi@migrantcare.net

Desa Rogojati – sebuah model dukungan yang efektif bagi mantan PMI di tengah krisis

Desa Rogojati di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, melaksanakan kebijakan desa yang proaktif untuk melawan COVID-19 dan mendukung para perempuan PMI yang pulang.

Desa Rogojati yang terletak di sebelah selatan Dataran Tinggi Dieng yang indah adalah salah satu desa Program [DESMIGRATIF](#) yang bertujuan untuk memberdayakan para pekerja migran dan keluarga mereka. Desa ini memiliki populasi 2077 jiwa yang mencakup 48 pekerja migran aktif dan 133 pekerja migran yang pulang - yang mayoritasnya adalah perempuan.

Untuk menghadapi COVID-19, Kepala Desa Rogojati, Etti Subiyarti, membangun berbagai fasilitas karantina di mana para penduduk yang kembali ke desa tersebut diwajibkan untuk menjalani karantina mandiri selama 14 hari. Gugus Tugas COVID-19 Rogojati juga terdiri dari perempuan dari Pusat Layanan Terpadu DESBUMI yang bekerja untuk memastikan agar para PMI yang berencana pulang ke desa memahami dan mematuhi protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh desa.

Baru-baru ini, pihak administrasi desa mengumpulkan data warga yang kehilangan pekerjaan akibat krisis, dan mengorganisasi usaha bersama perempuan untuk memproduksi dan memasarkan sejumlah produk. Salah satu mantan perempuan PMI yang menjadi bagian dari usaha tersebut memproduksi masker yang kemudian dibeli oleh pemerintah provinsi dan juga digunakan oleh masyarakat setempat.

Pemerintah desa menyediakan bantuan sosial, termasuk BLT Dana Desa, serta sembako bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya perempuan kepala keluarga dan keluarga PMI. Desa ini juga menyediakan area hotspot internet gratis untuk menjamin agar semua siswa memiliki akses internet untuk melanjutkan studi mereka secara daring (*online*).

Studi yang dilakukan J-PAL menunjukkan bahwa informasi adalah kunci untuk memperbaiki pengalaman calon PMI

Hingga 29 Juni, lebih dari 160.000 PMI telah kembali ke Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Banyak yang kehilangan pekerjaan karena kebijakan di negara tujuan, yang dilaksanakan demi membatasi penularan penyakit ini. Untuk melindungi para pekerja migran selama pandemi, Pemerintah Indonesia memberlakukan penghentian sementara pengiriman PMI ke luar negeri. Seiring dengan semakin menurunnya jumlah kasus di Asia Timur, ekonomi global perlahan-lahan akan mulai terbuka kembali, dan kembali membuka peluang kerja bagi para PMI. Namun, pertanyaannya masih sama: bagaimana para perempuan PMI dapat berangkat dan bekerja dengan aman selama dan pasca pandemi COVID-19?

Para peneliti yang terafiliasi dengan [J-PAL South East Asia](#), yaitu Samuel Bazzi, Lisa Cameron, Simone Schaner dan Firman Witoelar, dengan dukungan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ([BP2MI](#)), melakukan evaluasi acak untuk mencari berbagai cara untuk memberikan informasi kepada para calon PMI tentang kualitas suatu agensi penempatan.



Menyusul survei *baseline* yang dilakukan pada tahun 2015, para peneliti secara acak memilih 400 desa pengirim perempuan PMI terbesar di berbagai daerah di Indonesia yang kemudian dibagi menjadi kelompok intervensi (*treatment group*) dan kelompok pembandingan (*comparison group*). Kelompok intervensi menerima kartu laporan yang berisi peringkat agensi penempatan berdasarkan kualitasnya, atau buku komik yang berisi informasi tentang proses migrasi yang aman, atau keduanya (kartu laporan dan komik). Sementara itu, kelompok pembandingan tidak menerima informasi apa pun.

Dengan membandingkan desa-desa yang menerima komik dan kartu laporan dengan desa-desa yang hanya menerima komik, para peneliti dapat mengidentifikasi dampak dari kartu laporan tersebut. Demikian pula, dengan membandingkan desa-desa yang menerima komik dan kartu laporan dengan desa-desa yang hanya menerima kartu laporan, peneliti dapat mengungkap dampak dari komik tersebut.

Berdasarkan hasil data *endline* 2019, para peneliti menemukan bahwa:

- Kartu laporan mengurangi angka migrasi sebesar 5 poin persen.
- Pemahaman atas kualitas agensi membantu calon perempuan PMI mengambil keputusan yang lebih terinformasi tentang apakah mereka harus tetap bermigrasi atau tidak.
- Di antara yang memutuskan untuk bermigrasi, menerima kartu laporan dan komik membantu meningkatkan pengalaman sebelum dan sesudah migrasi yang mereka jalani.

Penelitian ini menyoroti pentingnya informasi dan pilihan dalam menentukan apakah dan bagaimana perempuan bermigrasi untuk bekerja. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebuah sistem di mana para calon perempuan PMI diberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami dapat meningkatkan hasil akhir bagi para perempuan tersebut, dengan membantu mereka memilih agensi yang tepat yang akan mempersiapkan mereka untuk berangkat di masa depan, begitu pembatasan perjalanan telah dicabut.

Walaupun demikian, masih terdapat risiko, yaitu para perempuan ini akan memilih jalur tidak resmi untuk mencari pekerjaan karena kesulitan ekonomi akibat pandemi ini. Untuk memitigasi risiko tersebut, Pemerintah Indonesia harus berinvestasi pada sistem yang dapat menghubungkan para calon PMI informal ke agensi penempatan bersertifikat dan berkualifikasi memadai, sambil tetap mengupayakan penyediaan lapangan pekerjaan bagi perempuan di dalam negeri.

Untuk informasi lebih lanjut tentang studi ini, hubungi Christal dari J-PAL Southeast Asia's Policy team di csetyobudi@povertyactionlab.org



Mari berhubungan dengan Program MAMPU, dan berikan masukan, komentar atau ide kolaborasi Anda di: info@mampu.or.id.

Nawala ini adalah produk kerja sama antara program-program pembangunan internasional yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan di Indonesia. Publikasi bulanan ini mengumpulkan dan menyajikan berbagai informasi tentang bagaimana krisis dan upaya mitigasi berdampak pada perempuan Indonesia, demi mendorong pengembangan program dan kebijakan yang responsif gender.